



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI**

JALAN H.M. YUSUF SINGADIKANE NO. 45, JAMBI  
TELEPON (0741) 668795, 668802; FAKSIMILE (0741) 668801; SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi](http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi)

NOTA DINAS

NOMOR ND- 206 /WPB.06/2018

Yth. : Direktur Pelaksanaan Anggaran  
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Provinsi Jambi  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Kajian Fiskal Regional Triwulan III (Quarterly Fiskal Report)  
Tahun 2018  
Tanggal : 12 November 2018

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Kajian Fiskal Regional, dengan ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan III (Quarterly Fiskal Report) Tahun 2018 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi..

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,  
  
Tjarta Sebayang



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# ***QUARTERLY FISCAL REPORT PROVINSI JAMBI***

**TRIWULAN III 2018**



**KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI  
NOVEMBER 2018**

## DAFTAR ISI

I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL .....	- 1 -
A.	Produk Domestik Regional Bruto .....	- 1 -
B.	Inflasi .....	- 2 -
C.	Indikator Kesejahteraan .....	- 3 -
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN .....	- 4 -
A.	Pendapatan Negara .....	- 5 -
B.	Belanja Negara.....	- 8 -
C.	Prognosis Realisasi APBN .....	- 10 -
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD .....	- 11 -
A.	Pendapatan Daerah .....	- 13 -
B.	Belanja Daerah.....	- 15 -
C.	Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018 .....	- 16 -
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) .....	- 17 -
V.	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	- 24 -
A.	Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi Tahun 2018 .....	- 24 -



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan III  
2018

**Penyusun:**

Penanggung Jawab: Tiarta Sebayang | Ketua Tim: Darmawan I  
Editor: Saripudin I Hendra Gunawan I Ahmad Yani | Desain Foto:  
Dyan Ari Iswanto | Penyusun : Bidang PPA II I BPS Provinsi Jambi I  
Bank Indonesia Perwakilan Jambi

**KANWIL DITJEN**  
**PERBENDAHARAAN**  
*Provinsi Jambi*

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

### A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Provinsi Jambi pada triwulan III 2018 tumbuh sebesar 4,77% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tumbuh 4,76% (yoy). Pertumbuhan ini juga masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,17% (yoy). Output ekonomi Provinsi Jambi triwulan III ini menghasilkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp53,029 triliun atau 1,38% dari total output Nasional (Rp3.835,6 triliun).

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id); [jambi.bps.go.id](http://jambi.bps.go.id); (diakses 6 Nov 2018) (data diolah)

Menurut lapangan usaha, triwulan ini pertumbuhan ekonomi Jambi terjadi di hampir semua sektor lapangan usaha, kecuali jasa keuangan dan asuransi. Tiga sektor tertinggi pertumbuhannya (yoy) yaitu informasi dan komunikasi (7,74%), pertambangan dan penggalian (7,61%), serta pengadaan listrik, gas dan produksi es (6,38%). Pada triwulan ini, sektor yang menjadi penyumbang andil terbesar pertumbuhan Jambi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,79%. Sedangkan menurut pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh pengeluaran konsumsi LNPRT (14,85%), diikuti pengeluaran konsumsi pemerintah (5,30%), sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 3,55%. Sumber pertumbuhan berdasarkan sektor pengeluaran berasal dari perubahan inventori (3,84%).

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, terdapat beberapa fenomena yang mempengaruhi output ekonomi Jambi, yaitu: (1) berlalunya puncak panen padi (bulan Maret 2018 membuat produksi padi menurun), (2) pertumbuhan sapi potong meningkat menjelang Idul Adha, (3) Terpenuhinya realisasi rencana kerja tahunan perusahaan kehutanan, (4) produksi CPO tumbuh baik q-to-q maupun y-on-y, (5) adanya momen libur tahun ajaran baru, libur keagamaan (Hari Raya Idul Adha), (6) realisasi APBN dan APBD triwulan III-2018 lebih tinggi dibanding triwulan II-2018 (adanya peningkatan realisasi belanja modal pemerintah).

*Output ekonomi Jambi triwulan III 2018 masih tumbuh 4,77% (yoy). Proyeksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi untuk ekonomi Jambi hingga akhir tahun diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,84%-5,24%.*

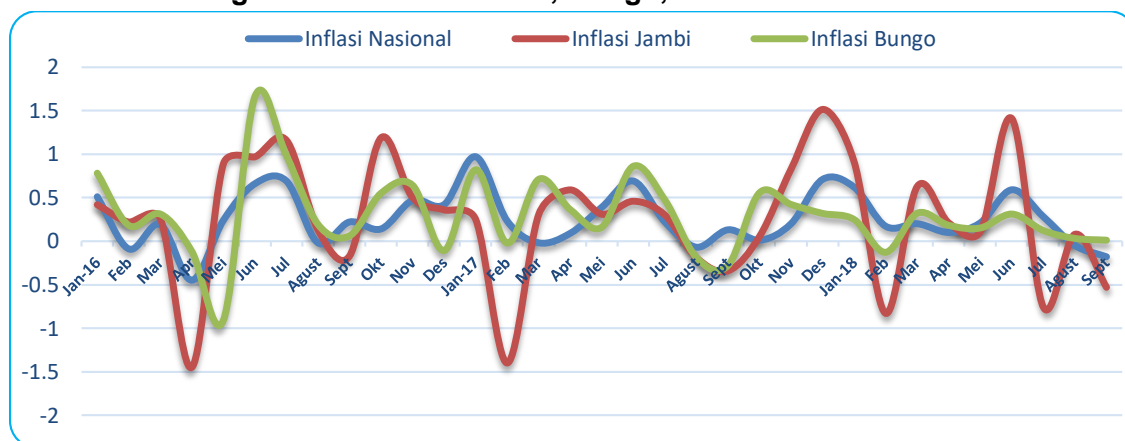
Dilihat dari strukturnya, (sisi lapangan usaha) ekonomi Provinsi Jambi belum mengalami perubahan, masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,72% dan diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 20,55%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa menyumbang 69,69%, impor barang dan jasa (sebagai pengurang) sebesar 45,90%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 44,06%. Berdasarkan strukturnya, ekonomi Jambi masih basisnya didominasi pada sektor primer dengan kemampuan penciptaan nilai tambah yang rendah.

Berikutnya berdasarkan proyeksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, ekonomi Jambi hingga akhir tahun diperkirakan tumbuh di kisaran 4,84%-5,24%. Selain sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian masih akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV mengingat harga komoditas migas dan batubara proyeksinya masih stabil (meski trennya menurun). Kebijakan pemerintah terkait penerapan B-20 untuk bahan bakar biodiesel diharapkan mampu meningkatkan harga CPO dalam negeri dan menopang konsumsi masyarakat.

## B. Inflasi

Data BPS triwulan III 2018 (terdapat 2 kota yang dihitung tingkat inflasi), berdasarkan perhitungan bulanan (*mtm*) bulan Juli, Agustus, dan September untuk Kota Jambi mengalami inflasi masing-masing sebesar -0,76%, 0,08%, dan -0,53%. Sedangkan inflasi Bungo masing-masing sebesar 0,12%, 0,03%, dan 0,01%. Provinsi Jambi berdasarkan perhitungan triwulanan (*qtq*) mengalami inflasi sebesar -1,07%.

**Grafik 1.2 Tingkat Inflasi Kota Jambi, Bungo, dan Nasional Tahun 2016-2018**



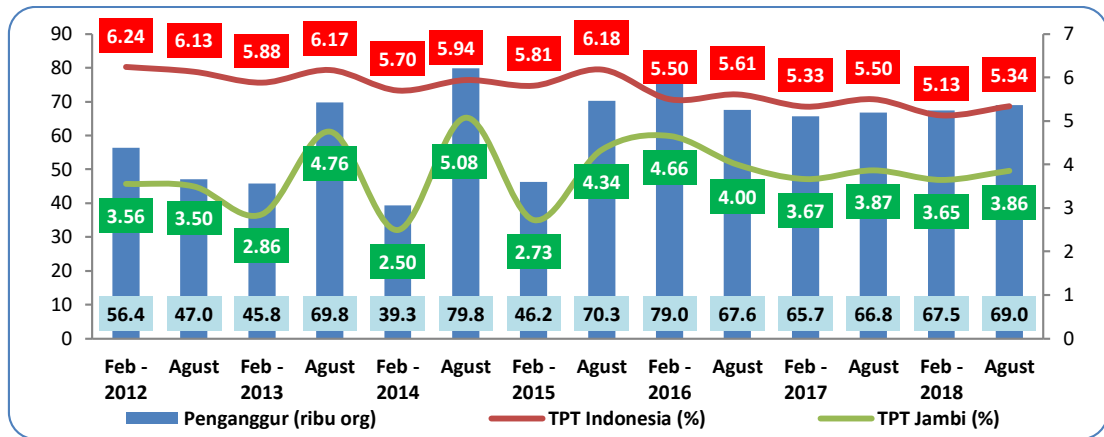
Sumber: Rilis BPS Jambi 2018

Berdasarkan asesmen Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, sumber deflasi yang berasal dari komponen *volatile foods* berasal dari komoditas daging ayam ras, minyak goreng, kentang, bawang merah dan beras. Hal ini disebabkan karena pasca momen Hari Raya Idul Fitri yang jatuh di triwulan II sehingga memasuki triwulan III, harga kembali normal. Sedangkan komoditas penyumbang inflasi dari kelompok *administered price* diantaranya: bensin, angkutan udara dan rokok kretek filter. Penyebabnya dikarenakan kenaikan harga pertamax dan avtur serta kenaikan cukai rokok tiap tahun semenjak tahun 2014.

**Menurut data BPS (yoy), dari 23 kota se-Sumatera yang dihitung tingkat inflasinya, Kota Jambi (3,43%) dan Bungo (2,56%) menempati urutan tertinggi ke-19 dan ke-7. Inflasi tertinggi di Kota Bengkulu (0,59%) dan terendah di Kota Bungo (0,01%).**

### C. Indikator Kesejahteraan

**Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jambi dan Nasional Tahun 2012-2018**

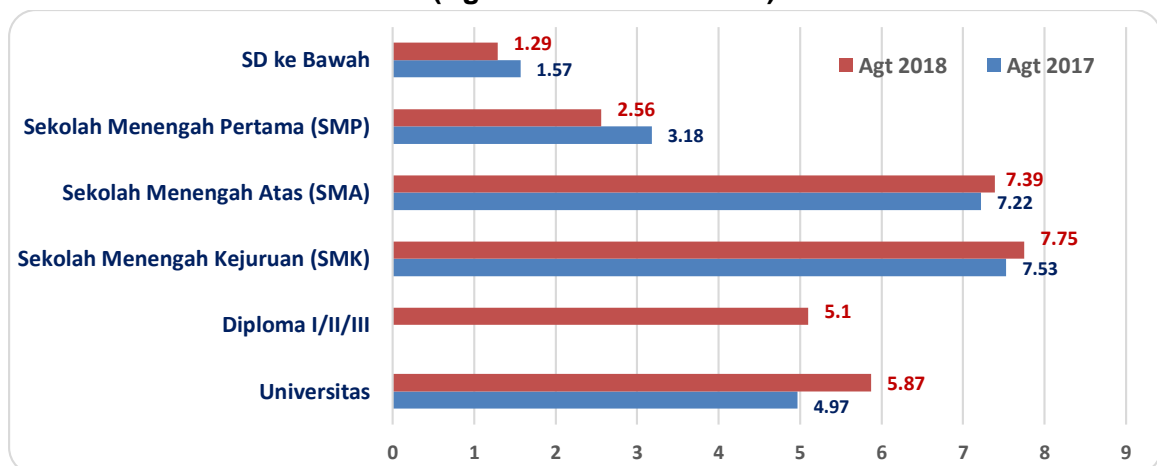


Sumber: Rilis BPS Jambi 2018

*“Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi pada Agustus 2018 tercatat sebanyak 69,04 ribu orang. Jumlah ini lebih tinggi sebesar 2,26 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 66,78 ribu orang”*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2018 sebesar 3,86%, turun dibandingkan pada Agustus 2017 (3,87%), dan masih lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 5,34%. Meskipun jumlah TPT Jambi turun namun terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) penyumbang tertinggi tingkat pengangguran terdapat pada golongan dengan tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA), dapat diindikasikan bahwa keterampilan yang dihasilkan oleh jenjang pendidikan SMA dan SMK belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. (2) tenaga kerja yang terserap lapangan kerja masih didominasi (41,07%) oleh golongan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah sebanyak 706,91 ribu orang.

**Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan (Agustus 2018 dan 2017)**



Sumber: Rilis BPS Jambi 2018

## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Informasi berikut merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluruh Kementerian/Lembaga/Satker lingkup Provinsi Jambi, termasuk data Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018;

**Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2018 dan 2017**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Change
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>4,910.6</b>	<b>3,080.4</b>	<b>5,973.1</b>	<b>3,322.6</b>	<b>7.9%</b>
<b>I. PENERIMAAN DALAM NEGERI</b>	<b>4,910.6</b>	<b>3,080.4</b>	<b>5,973.1</b>	<b>3,322.6</b>	<b>7.9%</b>
1. Penerimaan Pajak	4,498.7	2,662.0	5,445.2	2,839.3	6.7%
2. PNBPN	411.9	418.4	527.9	483.3	15.5%
<b>II. HIBAH</b>	-	-	-	-	
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>19,963.6</b>	<b>14,240.0</b>	<b>20,300.2</b>	<b>14,472.4</b>	<b>1.6%</b>
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>5,934.4</b>	<b>3,605.8</b>	<b>6,654.1</b>	<b>3,862.1</b>	<b>7.1%</b>
1. Belanja Pegawai	2,220.3	1,541.2	2,285.9	1,643.9	6.7%
2. Belanja Barang	2,217.0	1,227.5	2,759.1	1,534.1	25.0%
3. Belanja Modal	1,471.3	829.4	1,590.3	677.6	-18.3%
4. Belanja Bantuan Sosial	25.7	7.7	18.9	6.5	-15.5%
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-	
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>14,029.3</b>	<b>10,634.2</b>	<b>13,646.0</b>	<b>10,610.3</b>	<b>-0.2%</b>
1. Transfer ke Daerah	12,938.3	9,792.2	12,598.7	9,833.1	0.4%
a. Dana Perimbangan	12,873.4	9,727.2	12,378.2	9,639.4	-0.9%
1) Dana Alokasi Umum	7,957.6	6,630.8	7,969.3	6,641.1	0.2%
2) Dana Bagi Hasil	2,076.0	1,507.2	1,434.2	965.1	-36.0%
3) Dana Alokasi Khusus	2,839.8	1,589.2	2,974.7	2,033.2	27.9%
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-	
d. Dana Transfer Lainnya	65.0	65.0	220.5	193.8	198.3%
2. Dana Desa	1,090.9	842.0	1,047.3	777.2	-7.7%
<b>C. SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(15,053.0)</b>	<b>(11,159.6)</b>	<b>(14,327.1)</b>	<b>(11,149.8)</b>	<b>0.1%</b>

Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, KPP se-Prov. Jambi (Unaudited 2018)

Realisasi APBN lingkup Provinsi Jambi s.d. triwulan III-2018 menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp3,32 triliun. Tumbuh sebesar 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp3,08 triliun). Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh perbaikan kinerja penerimaan perpajakan (Rp2,84 triliun) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp483,3 miliar. Secara kumulatif penerimaan perpajakan masih mampu tumbuh 6,7% (tanpa program *tax amnesty*) dibanding tahun 2017 (Rp2,66 triliun).

Realisasi belanja negara sebesar Rp14,47 triliun, tumbuh sebesar 1,6% dibanding triwulan III-2017 (Rp14,24 triliun). Jumlah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3,86 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp10,61 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga triwulan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp3,60 triliun). Faktor utama penyebab kenaikan yaitu adanya pencairan gaji/tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN)



## A. Pendapatan Negara

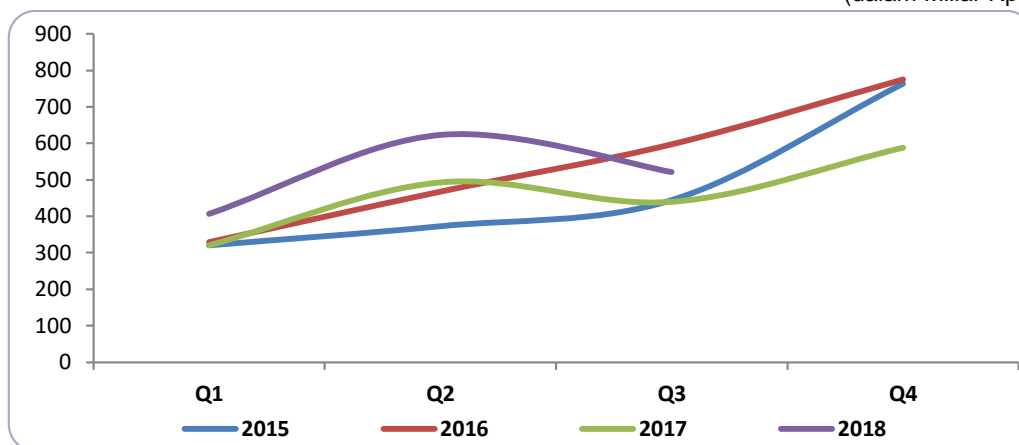
### 1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak internasional. Berikut adalah data pendapatan perpajakan yang dihasilkan di Provinsi Jambi;

#### a) Pajak Penghasilan (PPh)

**Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan PPh 2015-2018 di Provinsi Jambi**

(dalam Miliar Rp)



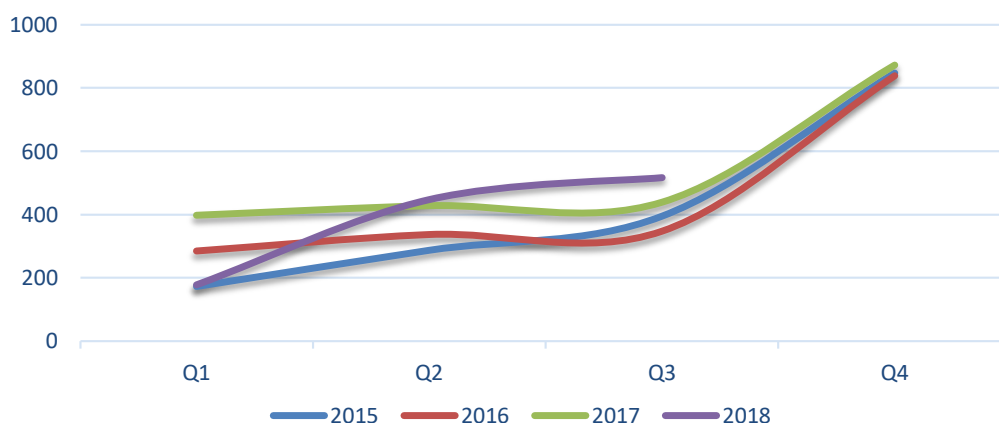
Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 10 Okt 2018) (data diolah);

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) triwulan III sebesar Rp520,8 miliar. Jumlah tersebut naik 18,34% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017 (Rp440,09 miliar). Peningkatan disumbang oleh realisasi PPh Ps 25/29 Badan sebesar Rp153,34 miliar (triwulan III-2017 Rp102,59 miliar) atau naik Rp50,75 miliar. Selanjutnya, PPh Ps 21 dan PPh Pasal 23 masih mampu tumbuh masing-masing sebesar Rp166,45 miliar (12,91%) dan Rp43,16 miliar (24,10%) dibanding triwulan tahun sebelumnya (Rp147,41 miliar dan Rp34,77 miliar).

#### b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

**Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPN 2015-2018 di Provinsi Jambi**

(dalam Miliar Rp)

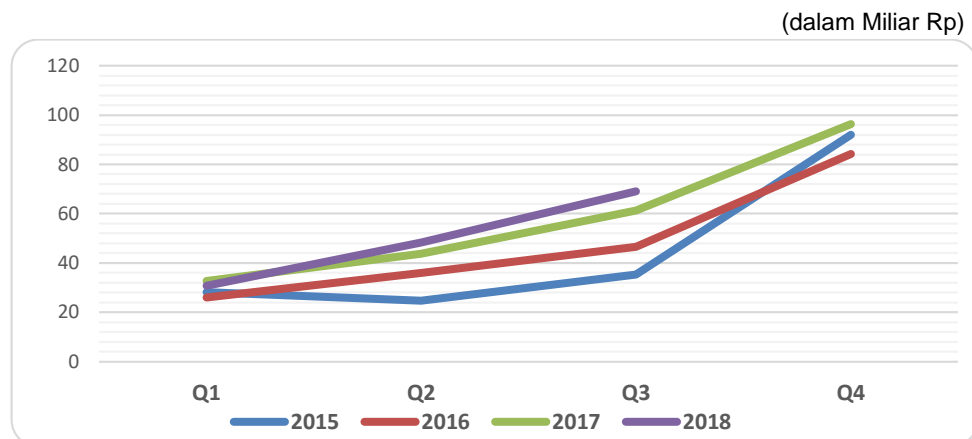


Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 10 Okt 2018) (data diolah);

Realisasi PPN triwulan III 2018 sebesar Rp517,0 miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 17,72% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 (Rp439,19 miliar). PPN Dalam Negeri masih menjadi dominan membentuk penerimaan PPN sebesar Rp515,7 miliar atau 99,75% dari total Penerimaan PPN. Sedangkan PPN Impor, PPN Lainnya dan PPNBM Dalam Negeri secara total hanya sebesar Rp1,3 miliar.

c) Pendapatan Pajak Lainnya & Pajak Perdagangan Internasional

**Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pajak Lainnya & Pajak Perdagangan Internasional 2015-2018 di Provinsi Jambi**

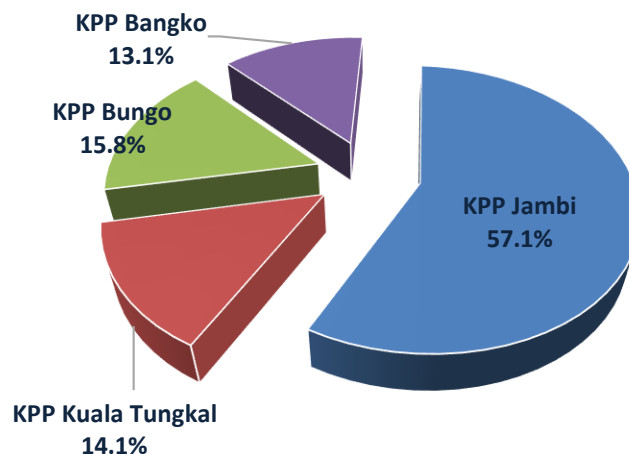


Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 10 Okt 2018) (data diolah);

Realisasi Pendapatan Pajak Lainnya dan Pajak Perdagangan Internasional triwulan III 2018 mencapai Rp69,12 miliar. Tumbuh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp61,19 miliar). Rinciannya, Pendapatan Pajak Lainnya Rp46,93 miliar. Terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp32,84 miliar, Cukai Rp20 juta dan Pajak Lainnya Rp14,07 miliar, sedangkan realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp22,18 miliar terdiri dari Bea Masuk (Rp3,49 miliar) dan Bea Keluar (Rp18,69 miliar).

**Penerimaan Pajak Menurut KPP Lingkup Provinsi Jambi**

**Grafik 2.4 Komposisi Penerimaan Pajak Menurut KPP Tahun 2018 (s.d. Triwulan III)**



Sumber: KPP se-Provinsi Jambi Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan data dari KPP di Provinsi Jambi (dari target Rp5,44 triliun), hingga 2018-Q3 telah tercapai sebesar Rp2,90 triliun atau 53,39% dari target. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (59,0%). Namun secara nominal sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya (Rp2,6 triliun), komposisinya yaitu: KPP Jambi memiliki realisasi terbesar Rp1,65 triliun (48,22% dari target Rp3,44 triliun). Sedangkan dari target, realisasi KPP Muara Bungo (Rp459,18 miliar) memiliki capaian tertinggi 65,79% dari target Rp697,9 miliar.

Proyeksi realisasi pendapatan perpajakan s.d. triwulan IV-2018 (seluruh KPP) masih sangat optimis dengan capaian 85%-95% dari total target penerimaan perpajakan.

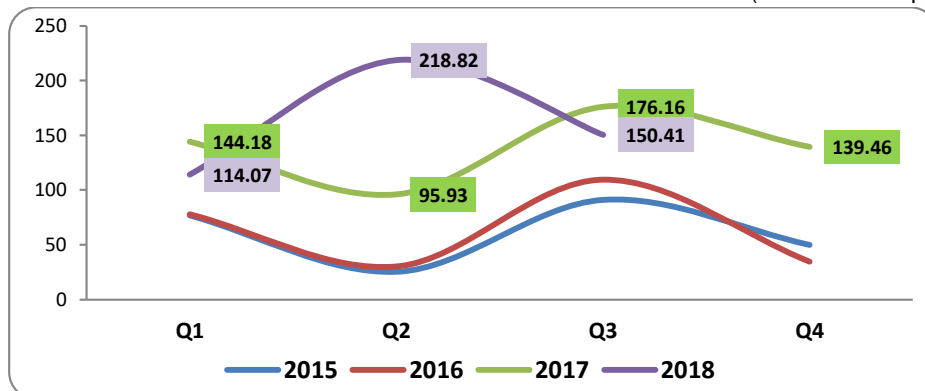
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan PNBP

**Grafik 2.5 Realisasi PNBP 2015-2018 di Provinsi Jambi**

(dalam Miliar Rp)

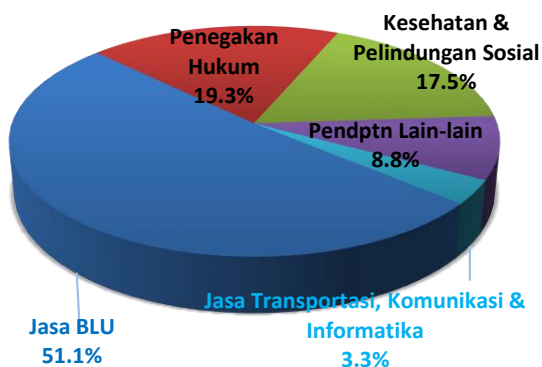


Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 06 November 2018) (data diolah);

Realisasi PNBP triwulan III 2018 sebesar Rp150,41 miliar atau berkontraksi hingga 14,62% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (Rp176,15 miliar). Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLU) penyumbang terbesar dengan Rp72,05 miliar, diikuti Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp31,35miliar, dan Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial & Keagamaan sebesar Rp28,94 miliar.

b) Komposisi PNBP di Provinsi Jambi

**Grafik 2.6 Komposisi PNBP di Provinsi Jambi Tahun 2018 (s.d. triwulan III)**



Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 06 November 2018) (data diolah);

Secara akumulatif, komposisi PNBP s.d. triwulan III 2018 didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLU) sebesar Rp247,12 miliar atau 51,13% dari total PNBP. Berikutnya, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp93,07 miliar (19,26%), Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan Rp84,43 miliar (17,47%), Pendapatan Lain-lain Rp42,6 miliar (8,82%), dan Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi & Informatika sebesar Rp16,17 miliar (3,35%).

***Pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) Badan Layanan Umum di wilayah Provinsi Jambi, yaitu: 1 BLU Bidang Kesehatan (RS. Bhayangkara Jambi) dan 2 BLU Bidang Pendidikan (UIN Sultan Thaha Saefudin dan Universitas Jambi)***

### 3. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan salah satu komponen APBN sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN, baik hibah langsung maupun hibah tidak langsung. Berdasarkan data SPAN, untuk Provinsi Jambi s.d. triwulan III 2018 **tidak terdapat** penerimaan yang berbentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Hibah s.d. Triwulan III  
Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2018**

(dalam Juta Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II (Rp)	(%) Realisasi atas Pagu
Hibah	-	-	-
Hibah Langsung	-	-	-
Total Hibah	-	-	-

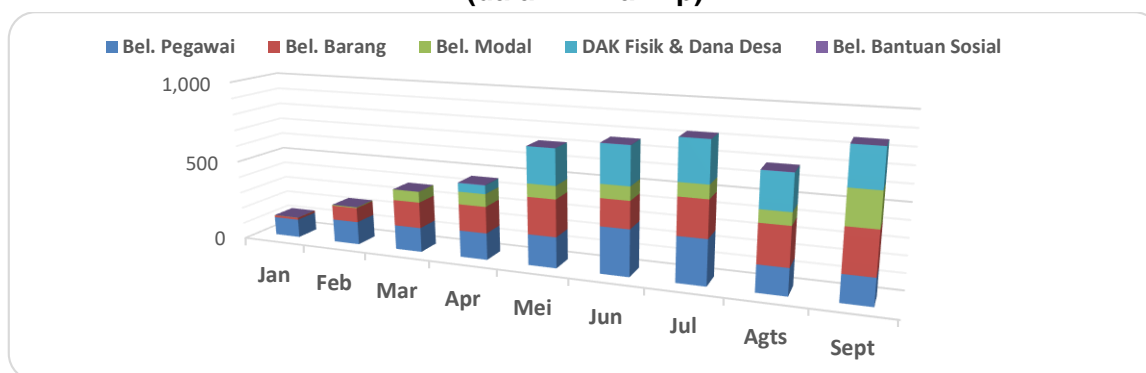
Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 06 November 2018) (data diolah);

### B. Belanja Negara

Belanja negara merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal, berupa tambahan belanja pemerintah (*increased spending*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan untuk membantu sektor riil. Belanja negara (APBN) di Provinsi Jambi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu:

#### 1. Belanja Pemerintah Pusat

**Grafik 2.7 Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, DAK Fisik & Dana Desa, serta Bantuan Sosial di Provinsi Jambi TA 2018  
(dalam miliar Rp)**



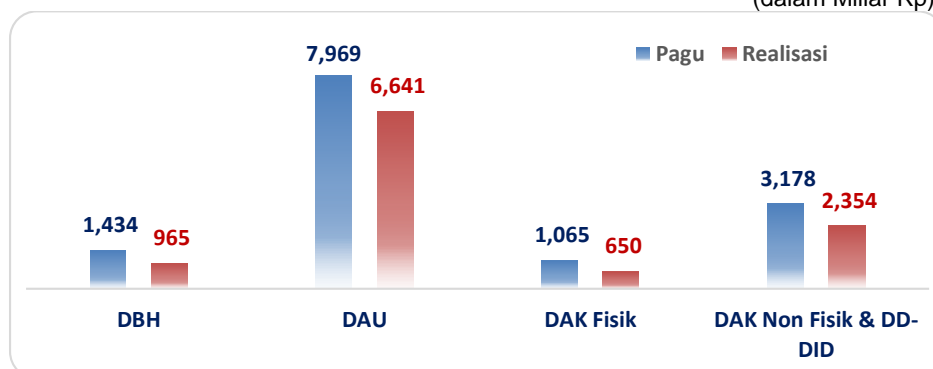
Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 06 November 2018) (data diolah);

Realisasi belanja (APBN) di Provinsi Jambi s.d. triwulan III 2018 telah mencapai Rp5,289 triliun (tidak termasuk DAU, DBH, dan DAK Non Fisik) atau sebesar 60,37% dari total pagu alokasi. Rinciannya, belanja pegawai Rp1,64 triliun, belanja barang Rp1,53 triliun, belanja modal Rp677,55 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp777,19 miliar. Pada triwulan III, terdapat realisasi belanja bantuan sosial dan DAK Fisik tahap II yang disalurkan oleh KPPN masing-masing Rp6,525 miliar dan Rp649,89 miliar. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) oleh Kanwil DJPB Provinsi Jambi, meningkatnya kinerja penyerapan belanja disebabkan sudah banyak satuan kerja (alokasi belanja modal cukup besar) yang telah mengeksekusi belanja modal (sekitar 42,61% dari alokasi belanja modal). Selain itu, berdasarkan indeks kualitas penyerapan anggaran (IKPA) mayoritas satuan kerja lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jambi memiliki nilai yang cukup tinggi.

## 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

**Grafik 2.8 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa  
Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2018 (s.d. September 2018)**

(dalam Miliar Rp)



Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>, SIMTRADA (diakses 06 November 2018) (diolah)

Realisasi penyaluran Dana Transfer ke Kas Daerah hingga triwulan III 2018 sebesar Rp10,61 triliun atau 77,75% dari alokasi pagu. Realisasi DAK Fisik tahap II sudah mulai disalurkan oleh KPPN pada bulan April 2018 bagi pemda yang telah melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik 2018. Persyaratan tersebut yaitu laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dan telah melakukan input data capaian output DAK Fisik Tahap I 2018. KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa hanya dapat melaksanakan penyaluran DAK Fisik (tahap II) dari Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan pada **capaian penyerapan belanja** dan **capaian output** per bidang (yang dikelola oleh SKPD Pemda) untuk DAK Fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga realisasinya akan berdasarkan prestasi masing-masing Pemda dalam melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### Pengelolaan BLU

Pada 2018, BLU Pusat yang terdapat di wilayah kerja Kanwil DJPB Provinsi Jambi adalah UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi. Kemudian ditambah Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang telah ditetapkan menjadi BLU di bidang pelayanan kesehatan (pertengahan triwulan II-2017) dan terakhir adalah Universitas Jambi (akhir tahun 2017).

Untuk RS Bhayangkara, saat ini sudah menjadi BLU Kesehatan secara penuh. Tahapan masa transisi telah dilalui RS Bhayangkara dengan memenuhi seluruh persyaratan sesuai standar pelayanan minimal BLU di bidang kesehatan. Keberadaan 3 BLU tersebut telah memberikan dampak terjadinya peningkatan penerimaan negara bukan pajak sampai dengan triwulan III 2018 sebesar 51,13% dari total PNBPNP.

### Manajemen Investasi Pusat

Perkembangan Penyaluran KUR di Provinsi Jambi

Di Provinsi Jambi, penyaluran KUR (Mikro, Ritel, dan TKI) tahun 2018 dilaksanakan oleh 12 (duabelas) lembaga keuangan perbankan, yaitu BRI, Mandiri, BNI, Bank Artha Graha, BCA, Maybank, BPD Jambi, BPD Sumatera Barat, Bank Sinarmas, Bank Bukopin, BRI Agro dan BTN dengan total nilai *outstanding* Rp1,55 triliun. Berdasarkan data SIKP, nilai akad realisasi KUR 2018 s.d triwulan III di Provinsi Jambi mencapai Rp1,84 triliun dengan jumlah debitur mencapai 44.992 debitur.

**Tabel 2.4 Realisasi Penyaluran KUR Menurut Sektor Usaha 2018**

No	Sektor Usaha	Realisasi KUR 2018		
		Akad (dlm jutaan)	Outstanding (dml jutaan)	Debitur
1	Pertanian dan Kehutanan	1.068.871	915.575	24.633
2	Perikanan	19.591	14.091	463
3	Industri Pengolahan	35.986	30.249	1.105
4	Konstruksi	1.000	176	2
5	Perdagangan Besar & Eceran	607.620	507.277	15.901
6	Penyediaan Akomodasi & Makanan	19.979	16.112	363
7	Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi	17.490	15.293	373
8	Real Estate, Persewaan & Jasa	5.547	4.770	72
9	Jasa Pendidikan	875	754	13
10	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2.350	1.752	7
11	Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, & Hiburan	58.317	48.668	2.060
<b>Total</b>		<b>1.837.624</b>	<b>1.554.719</b>	<b>44.992</b>

Sumber: <https://sikp.kemenkeu.go.id> (akses tanggal 08 November 2018)

Sektor usaha yang paling besar menerima program KUR didominasi oleh sektor Pertanian dan Kehutanan dengan nilai outstanding Rp915,57 miliar. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar & Eceran dengan nilai outstanding Rp507,27 miliar dan sisanya (Rp131,86 miliar) terbagi ke 9 sektor lainnya. Penyaluran KUR Mikro didominasi oleh BRI dengan nilai outstanding Rp571,06 miliar, sedangkan Bank Mandiri dominan menyalurkan KUR Ritel (Rp622,18 miliar).

Belum optimalnya realisasi penyaluran KUR di Provinsi Jambi salah satu penyebab utamanya adalah masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi yang mendorong akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bersaing dalam iklim usaha yang kompetitif.

### C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan pendapatan dan belanja APBN s.d. triwulan IV-2018 lingkup Provinsi Jambi masing-masing Rp4,23 triliun (77,7% dari target) dan Rp7,93 triliun (91,7%). Rendahnya proyeksi pendapatan memperhatikan masih fluktuatifnya harga komoditas unggulan (sawit dan karet) sehingga akan mempengaruhi pendapatan perpajakan (PPH Ps.21 dan Ps.25/29 Badan). Untuk belanja, diharapkan capaiannya bisa melebihi proyeksi dengan mempertimbangkan petunjuk teknis revisi DIPA 2018 diharapkan belanja dapat diserap sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran.

**Tabel 2.5 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV*	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	5.973,10	2.065,21	34,58%	4.641,10	77,70%
Belanja Negara	8.761,54	5.289,16	60,37%	8.034,33	91,70%
Surplus/Defisit	(1.023,73)	(1.967)	-	(3.393,23)	-

Ket: tidak termasuk transfer ke daerah (DAU, DBH, dan DAK Non Fisik)

\*) perkiraan realisasi menggunakan metode analisis *trend*

### III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Informasi berikut merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Provinsi Jambi;

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Agregat Lingkup Provinsi Jambi  
s.d. Triwulan III TA 2018 dan 2017**

(dalam Miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>	<b>16.279,6</b>	<b>12.177,4</b>	<b>17.317,4</b>	<b>12.644,01</b>
<b>PAD</b>	<b>2.473,8</b>	<b>1.751,9</b>	<b>2.689,0</b>	<b>1.950,34</b>
Pajak Daerah	1.565,9	1.141,2	1.700,8	1.343,09
Retribusi Daerah	199,7	81,3	121,2	69,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	108,1	104,6	128,6	115,29
Lain-Lain PAD yang Sah	600,2	424,7	738,5	422,72
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>13.767,0</b>	<b>10.372,1</b>	<b>14.466,4</b>	<b>10.691,06</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>12.348,3</b>	<b>9.212,8</b>	<b>12.533,0</b>	<b>9.351,32</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	987,5	182,9	1.006,9	591,12
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	179,3	1.147,3	223,5	348,75
Dana Alokasi Umum	8.462,6	6.348,8	8.289,4	6.435,24
Dana Alokasi Khusus	2.718,9	1.533,9	3.013,2	1.976,20
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>947,8</b>	<b>830,0</b>	<b>1.303,9</b>	<b>949,93</b>
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	947,8	830,0	1.303,9	949,93
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>470,8</b>	<b>329,3</b>	<b>524,8</b>	<b>387,46</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	470,8	329,3	524,8	387,46
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,7</b>	<b>2,34</b>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	104,7	2,34
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>38,8</b>	<b>53,5</b>	<b>161,9</b>	<b>2,60</b>
Pendapatan Hibah	8,1	40,3	160,9	2,52
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	30,7	13,2	1,0	0,08
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>16.279,6</b>	<b>12.177,4</b>	<b>17.317,4</b>	<b>12.644,01</b>



Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>BELANJA</b>	<b>14.885,8</b>	<b>8.411,1</b>	<b>15.726,7</b>	<b>8.518,39</b>
Belanja Pegawai	6.713,3	4.396,5	7.263,6	4.679,57
Belanja Barang	3.207,6	1.633,3	3.675,3	1.804,70
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	14,9	10,0	41,3	14,61
Belanja Hibah	793,1	421,3	690,8	452,14
Belanja Bantuan Sosial	33,6	21,3	42,7	25,67
Belanja Bantuan Keuangan	333,1	236,7	129,1	-
Belanja Modal	3.736,2	1.685,3	3.850,3	1.537,12
Belanja Tidak Terduga	54,1	6,7	33,7	4,54
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>2.203,2</b>	<b>1.273,6</b>	<b>2.444,9</b>	<b>1.604,22</b>
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	565,6	407,0	593,3	416,05
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	562,7	406,9	593,3	416,05
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2,9	0,1	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	1.637,6	866,7	1.851,6	1.188,16
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	2,7	2,34
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.633,3	862,5	1.836,4	1.180,82
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4,3	4,1	12,5	4,99
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>17.089,0</b>	<b>9.684,8</b>	<b>18.171,5</b>	<b>10.122,61</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(809,4)</b>	<b>2.492,7</b>	<b>(854,1)</b>	<b>2.521,40</b>

Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD se-Provinsi Jambi 2018 (data diolah); (Unaudited)

Realisasi APBD agregat lingkup Provinsi Jambi s.d. triwulan III 2018 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp12,64 triliun atau 72,87% dari total pagu pendapatan daerah. Jumlah realisasi tersebut lebih tinggi 2,07% dibandingkan tahun sebelumnya (Rp12,17 triliun). Komposisinya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,95 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp10,69 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,6 miliar.

Berikutnya, realisasi APBD untuk belanja dan transfer daerah baru mencapai Rp10,12 triliun atau 55,70% dari total pagu belanja dan transfer daerah. Terdapat perbaikan jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9,68 triliun. Realisasi belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp1,80 triliun (lebih baik dibanding realisasi tahun sebelumnya Rp1,63 triliun) dan Rp1,53 triliun (lebih rendah dibanding tahun sebelumnya Rp1,68 triliun). Sedangkan realisasi transfer pemerintah daerah sebesar Rp1,6 triliun, jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya (Rp1,27 triliun).

Total belanja realisasi belanja agregat (s.d triwulan III 2018) masih dibawah target realisasi nasional (54,95% dari total pagu belanja agregat). Rendahnya kinerja realisasi belanja daerah juga terlihat dari selisih total pendapatan daerah dengan total belanja dan transfer yang mencapai surplus Rp2,52 triliun. Peran *government spending* (pengeluaran konsumsi pemerintah) sebagai stimulus ekonomi Jambi menjadi tidak optimal mengingat laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih ditopang oleh sektor primer (komoditas pertanian dan perkebunan) yang sangat rentan terhadap permintaan dan gejolak harga komoditas global.



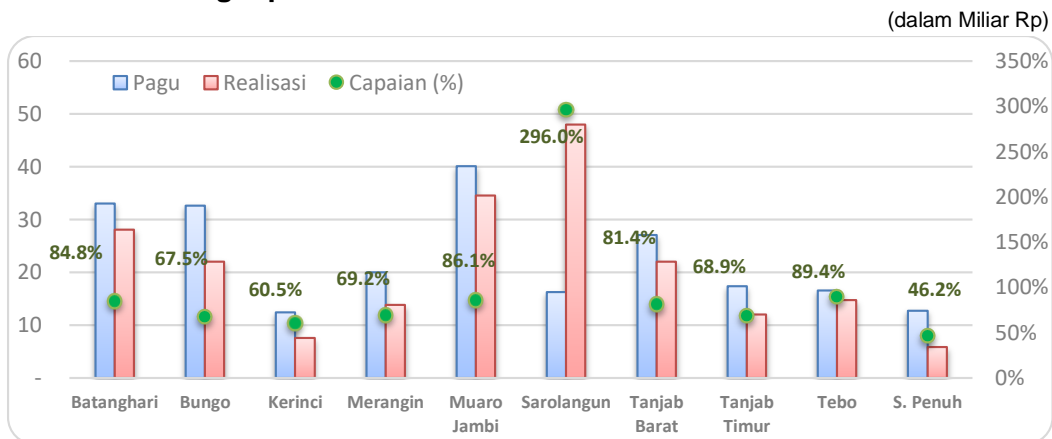
## A. Pendapatan Daerah

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD (agregat) sebesar Rp1,95 triliun terdiri dari Pajak Daerah Rp1,34 triliun, Retribusi Daerah Rp69,2 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp115,2 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp422,7 miliar. Capaian realisasi PAD agregat mencapai 71,52% dari total target PAD.

#### a) Penerimaan Pajak Daerah

**Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2018**

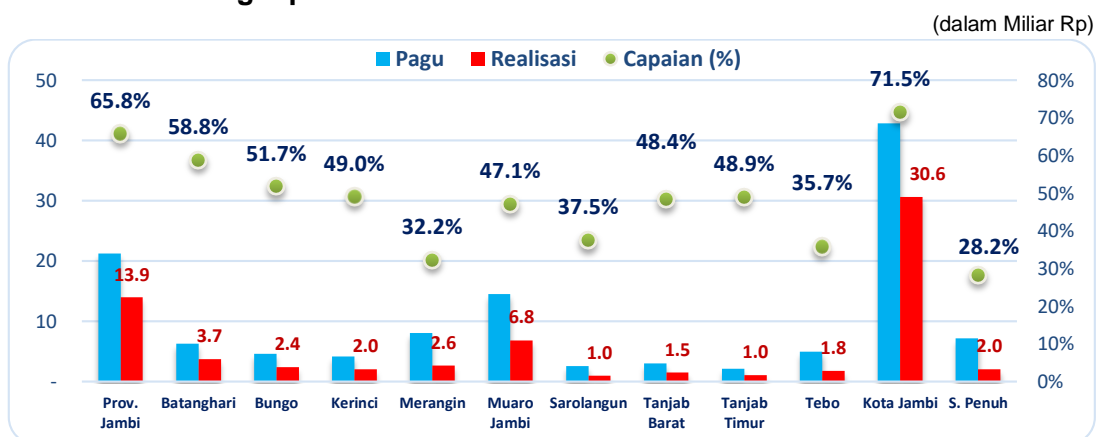


Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2018 (diolah)

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (agregat) s.d. triwulan III 2018 (Rp1,34 triliun) tercapai 79,02% dari target, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1,14 triliun. Berikutnya, realisasi dan capaian penerimaan pajak daerah Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi masing-masing sebesar Rp976,17 miliar (76,7%) dan Rp158,37 miliar (79,2%).

#### b) Penerimaan Retribusi Daerah

**Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2018**

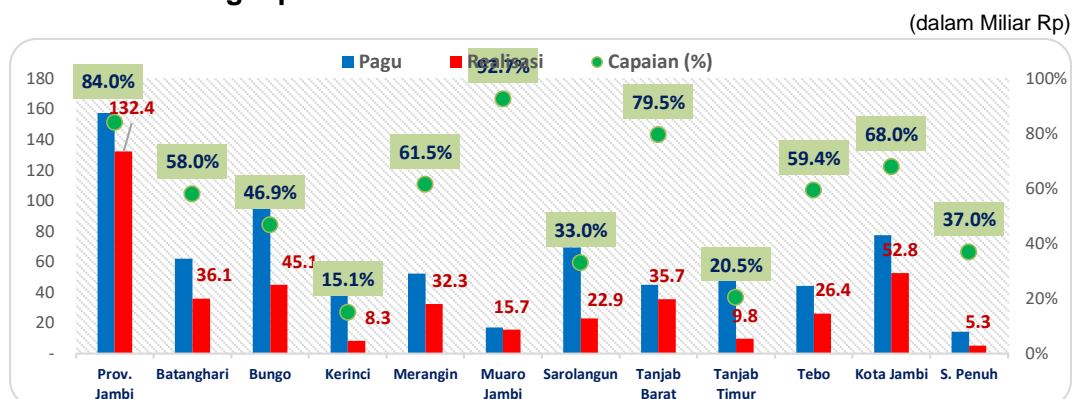


Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2018 (diolah)

Untuk Penerimaan Retribusi (seluruh Pemda) s.d. triwulan III 2018 (Rp69,22 miliar) baru tercapai 57,12% dari target. Dari sisi capaian, angka tersebut lebih baik jika dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu (40,7%), namun dari sisi nominal, tahun lalu masih lebih baik (Rp81,28 miliar). Target penerimaan dari retribusi terbesar adalah Kota Jambi (Rp42,84 miliar) yang menjadi pusat perdagangan dan bisnis di Provinsi Jambi, realisasi hingga triwulan III sudah mencapai Rp30,63 miliar.

c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

**Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2018**



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2018 (diolah)

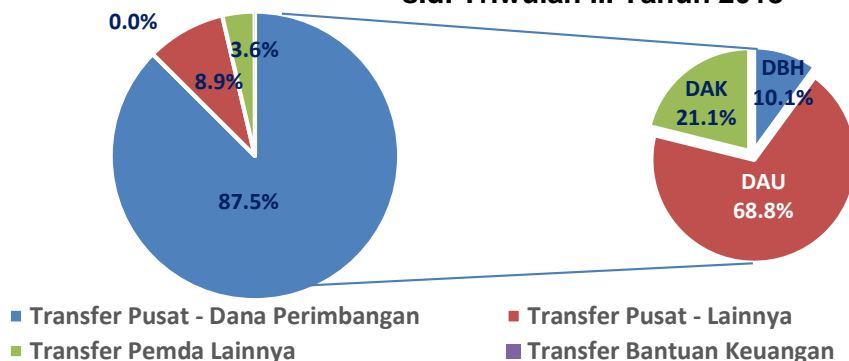
Berikutnya, Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah (agregat) s.d. triwulan III 2018 (Rp422,72 miliar) realisasinya telah mencapai 54,45% dari total target. Namun perlu kita ketahui bahwa sumber utama penerimaan lain-lain PAD yang sah berasal dari pendapatan BLUD dan pendapatan bunga deposito. Dan secara proporsi, komposisi pendapatan bunga deposito kurang lebih 30%-40% dari total penerimaan, dan kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh pemerintah daerah. Adanya sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan bunga deposito menunjukkan masih terdapat *idle money* yang dimiliki Pemda dengan nilai yang cukup signifikan (secara agregat).

*Masih munculnya Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari imbal jasa bunga deposito/simpanan perbankan mengindikasikan **idle money** yang dimiliki Pemda dan disimpan di perbankan nilainya signifikan*

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan data LRA seluruh Pemda (provinsi/kabupaten/kota) s.d. triwulan III, realisasi pendapatan transfer agregat mencapai Rp10,69 triliun. Terdiri dari transfer dana pemerintah pusat (Transfer dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya) masing-masing sebesar Rp9,35 triliun dan Rp949,9 miliar, transfer pemerintah provinsi (dana bagi hasil pajak) sebesar Rp387,4 miliar dan transfer bantuan keuangan (bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota lainnya) sebesar Rp2,34 miliar.

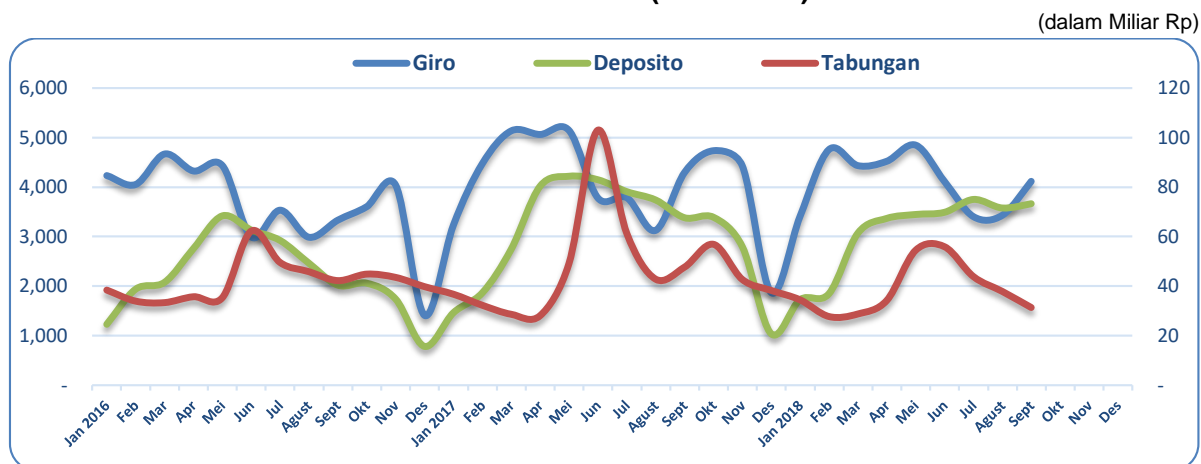
**Grafik 3.4 Komposisi Pendapatan Transfer (Agregat) s.d. Triwulan III Tahun 2018**



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2018 (data diolah)

Tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Penyebabnya pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan utama bagi 12 pemda lingkup Provinsi Jambi.

**Grafik 3.5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga 12 Pemda di Provinsi Jambi (2016-2018)**



Sumber: Bank Indonesia 2018 (data diolah);

Berikutnya menurut data Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Indonesia, posisi per 30 September 2018 menunjukkan Giro, Deposito, dan Tabungan pemda mencapai **Rp4,11** triliun, **Rp3,66** triliun, dan Rp31,46 miliar. Besaran saldo deposito pemda pada triwulan III-2018 memiliki tren yang sama dengan periode tahun sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan pemda untuk menempatkan *idle money* dalam bentuk deposito malah bersifat kontraproduktif terhadap kebijakan belanja pemerintah (*government spending*) yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi dan mampu memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi, menjadi tidak efektif dan kurang optimal.

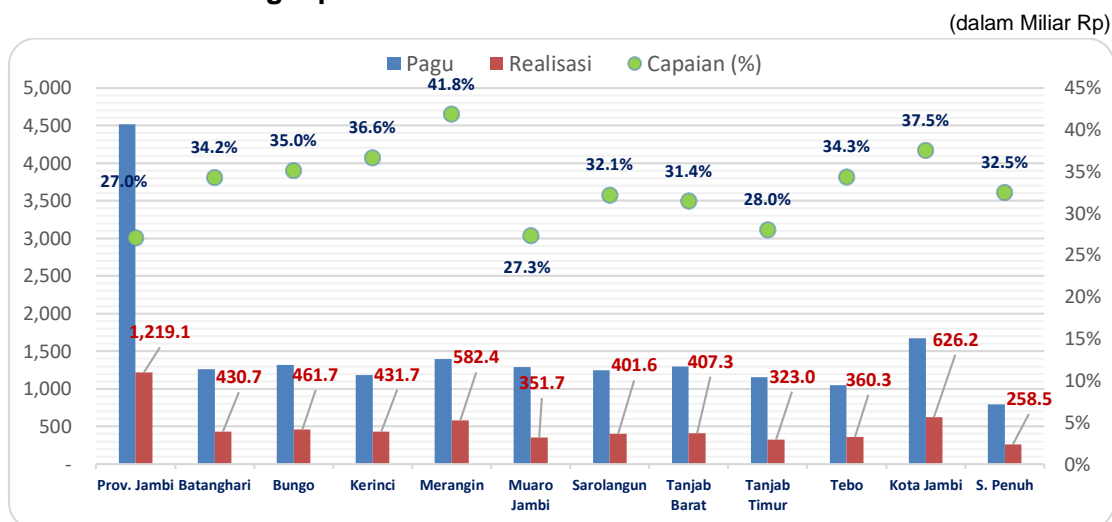
**3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan darurat, dan pendapatan lainnya, termasuk hibah langsung yang diterima oleh pemerintah daerah. Nilai realisasi dan capaian secara agregat s.d. triwulan III 2018 sebesar Rp2,60 miliar, tidak terlalu signifikan jumlahnya jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

**B. Belanja Daerah**

**1. Realisasi Belanja per Kabupaten/Kota**

**Grafik 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2018**

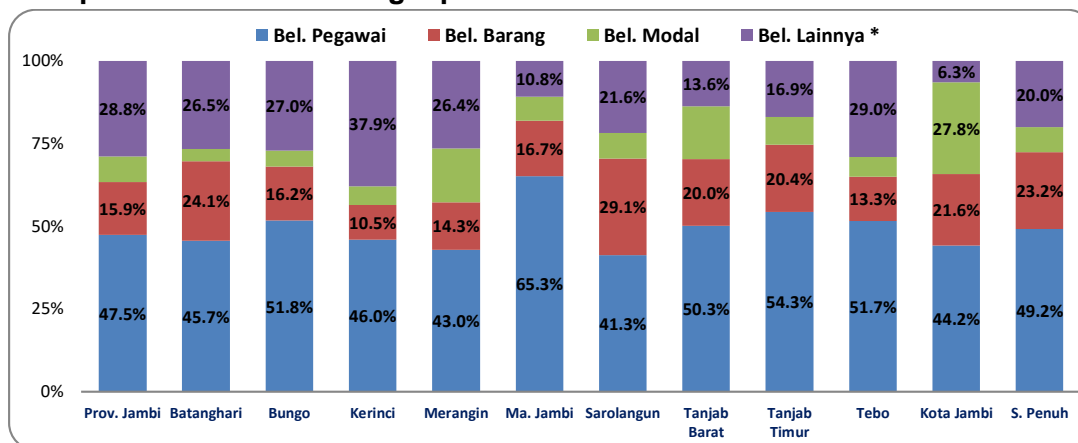


Sumber: DPKAD 2018 (diolah)

Secara agregat, realisasi belanja daerah hingga akhir triwulan III 2018 mencapai Rp10,12 triliun (55,70% dari total pagu). Capaian ini secara nominal hanya sedikit lebih baik dibandingkan realisasi belanja periode yang sama tahun 2017, terserap Rp9,68 triliun (56,6% dari total pagu). Masih rendahnya serapan realisasi belanja daerah mengakibatkan terjadinya **surplus** hingga mencapai **Rp2,52 triliun**. Dengan begitu, jika dirata-rata (dibagi 12 pemda) terdapat **idle money** dari transaksi berjalan sekitar Rp210,12 miliar.

## 2. Komposisi Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja per Kabupaten/Kota

**Grafik 3.5 Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja per Prov/Kab/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2018**



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2018 (data diolah)

Ket: \*) Bel. Subsidi, Hibah, Bansos, Tak Terduga, dan Bel. Transfer ke Desa

Menurut jenis belanja, realisasi APBD (agregat) masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp4,67 triliun (46,7% dari total realisasi belanja). Diikuti Belanja Barang sebesar Rp1,8 triliun (18,04%), Belanja Modal sebesar Rp1,53 triliun (15,36%), dan Belanja Lainnya sebesar Rp1,98 triliun (19,84%).

## C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Perkiraan pendapatan dan belanja daerah (agregat) s.d. akhir tahun 2018 lingkup Provinsi Jambi masing-masing Rp14,8 triliun (90,9% dari target) dan Rp14,36 triliun (84,5%). Proyeksi tersebut merupakan target yang sangat optimis mengingat perlu adanya perbaikan kinerja belanja daerah pada triwulan ke III dan IV tahun 2018 berupa percepatan penyelesaian sejumlah proyek di triwulan IV. Selain itu, adanya peran aktif Kanwil DJPB dan KPPN dalam mendukung pelaksanaan monitoring evaluasi transfer ke daerah dan dana desa terhadap kinerja penyerapan belanja dan capaian output, serta ketepatan waktu pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing Pemda secara intensif dan berkelanjutan sehingga memacu Pemda untuk lebih disiplin melaksanakan eksekusi belanja daerah.

**Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jambi Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018**

(dalam Miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV*	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	17.296,98	12.644,01	73,10%	15.722,96	90,90%
Belanja Daerah	18.327,37	10.122,61	55,23%	15.486,63	84,50%
Surplus/Defisit	(1.030,39)	2.521,40	-	236,33	-

Ket: \*) perkiraan realisasi menggunakan metode analisis *trend*

#### IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

##### A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu. Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian  
Tingkat Wilayah Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2018 dan 2017**

(dalam Miliar Rp)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>3.322,62</b>	<b>11.873,88</b>	<b>5.204,22</b>	<b>3,4%</b>	<b>5.032,17</b>
Pendapatan Perpajakan	2.839,32	1.343,69	4.183,01	10,0%	3.802,08
Pendapatan Bukan Pajak	483,30	10.530,19	1.021,21	-6,8%	1.095,95
Hibah	0,00	0,00	0,00	-100,0%	40,32
Transfer	0,00	0,00	0,00	-100,0%	93,82
<b>Belanja Negara</b>	<b>14.822,84</b>	<b>9.239,97</b>	<b>13.452,48</b>	<b>1,2%</b>	<b>13.296,28</b>
Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	4.212,50	8.086,76	12.299,26	-2,2%	12.575,26
Transfer	10.610,33	1.153,21	1.153,21	59,9%	721,02
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(11.500,21)</b>	<b>2.633,91</b>	<b>(8.248,26)</b>	<b>-0,2%</b>	<b>(8.264,10)</b>
<b>Pembiayaan</b>	-	<b>896,10</b>	<b>896,10</b>	<b>13,4%</b>	<b>790,55</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	968,41	968,41	17,1%	827,23
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	72,31	72,31	97,1%	36,68
<b>Sisa Lebih (Kurang)</b>	<b>(11.500,21)</b>	<b>3.530,01</b>	<b>(7.352,16)</b>	<b>-1,6%</b>	<b>(7.473,56)</b>
<b>Pembiayaan Anggaran</b>	<b>(11.500,21)</b>	<b>3.530,01</b>	<b>(7.352,16)</b>	<b>-1,6%</b>	<b>(7.473,56)</b>

Sumber : GFS Triwulan III 2018 Kanwil DJPb Prov Jambi (data diolah)

Catatan:

- \*) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

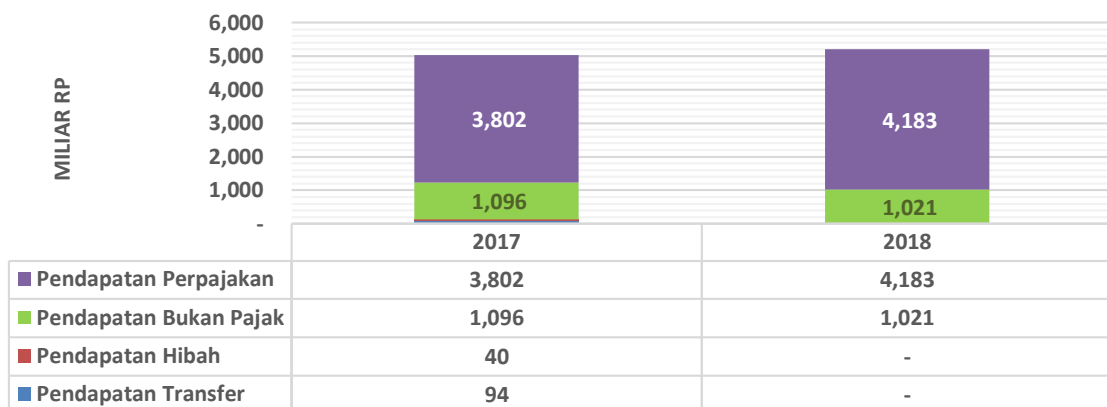
##### B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resipikal (berelasi).

###### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian dan PNBK konsolidasian terhadap total pendapatan konsolidasian. Perbandingan komposisi pendapatan, yaitu: antara pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pendapatan perpajakan dan PNBK, dan lain-lain. Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBK, hibah dan transfer dana bantuan ke desa.

**Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jambi s.d. Triwulan III TA 2018 dan 2017**

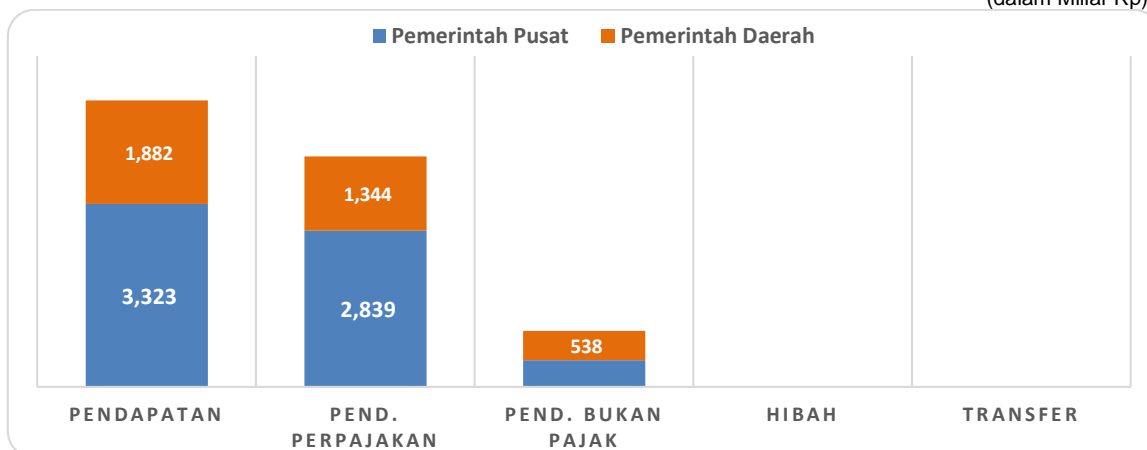


Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2018 (diolah)

Realisasi pendapatan konsolidasian s.d. triwulan III 2018 sebesar Rp5,20 triliun. Berdasarkan komposisinya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, proporsi pendapatan perpajakan sedikit meningkat dibanding proporsi PNBPN. Peningkatan pendapatan bukan pajak konsolidasian pada 2018, disebabkan adanya perubahan metode perhitungan (formula) laporan konsolidasian pemerintah. Pada formula sebelumnya, pendapatan transfer dan hibah merupakan akun tersendiri, sedangkan pada formula terbaru pendapatan transfer dan hibah direklasifikasi ke dalam akun PNBPN konsolidasian.

**Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2018**

(dalam Miliar Rp)



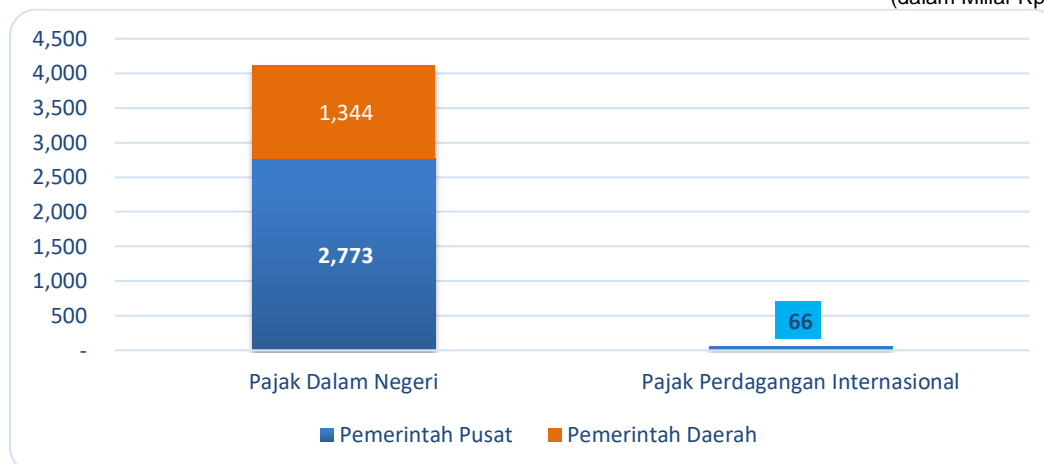
Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2018 (diolah);

Berikutnya, jika pendapatan konsolidasian ditelaah lebih lanjut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka terlihat jelas tingkat ketergantungan pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer. Total pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp3,32 triliun, sedangkan dana transfer ke daerah mencapai Rp10,61 triliun sehingga terjadi defisit anggaran. Meskipun demikian, kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran masing-masing daerah sehingga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

## 2. Analisis Perubahan

**Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian s.d. Triwulan III 2018**

(dalam Miliar Rp)



Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2018 (diolah);

Realisasi penerimaan perpajakan konsolidasian s.d. triwulan III sebesar Rp4,18 triliun. Proporsi pajak dalam negeri pemerintah pusat (Rp2,77 triliun) dan pemerintah daerah (Rp1,34 triliun) terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian masing-masing mencapai 66,3% dan 32,1%, sedangkan sisanya disumbang pajak perdagangan internasional (Rp65,8 miliar). Dari total penerimaan perpajakan konsolidasian tersebut, nilai pajak dalam negeri (pusat dan daerah) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total output ekonomi Jambi (atas dasar harga berlaku) sebesar Rp53,02 triliun. Jika realisasi pajak tersebut dijadikan acuan *tax ratio* di Provinsi Jambi, maka nilai *tax ratio*-nya hanya sebesar 7,89%.

## 3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Dengan tersedianya data realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah, maka pendapatan di suatu daerah dapat diperluas tidak hanya pada PAD yang diterima Pemerintah Daerah namun mencakup seluruh penerimaan pemerintah pusat dan daerah di wilayah tersebut yang terdiri:

- Pendapatan pajak daerah,
- Retribusi daerah,
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- Lain-lain PAD yang sah.
- Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Pendapatan BLU Pemerintah Pusat

**Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018**

(dalam miliar)

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	3.802,08	-	4.183,01	10,00%
PNBP	1.095,95	-	1.021,20	-6,82%
Total	4.898,03	-	5.204,22	6,25%
PDRB/Pert. Ekonomi	34.316,2	-	35.952,5	4,77%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb; BPS 2018 (diolah)



Pada triwulan III 2018, output ekonomi Jambi (atas dasar harga berlaku) mencapai Rp53,03 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,77% (yoy). Sedangkan pada periode yang sama, pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp5,20 triliun. Berikutnya, masih rendahnya *tax ratio* dan besarnya selisih (*gap*) nilai pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut, menunjukkan bahwa sebenarnya masih terdapat potensi penerimaan dari aktivitas perekonomian yang belum dioptimalkan pada penerimaan pemerintah daerah.

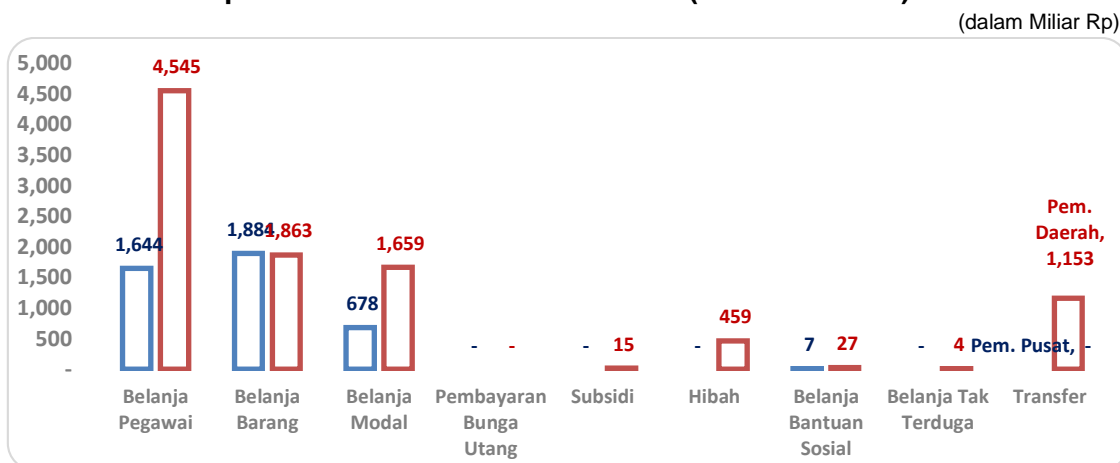
### C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi). Analisis terhadap Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas:

#### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi dan komposisi realisasi berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), atau perbandingan antara realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja konsolidasian. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

**Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jambi Tahun 2018 (s.d Triwulan III)**



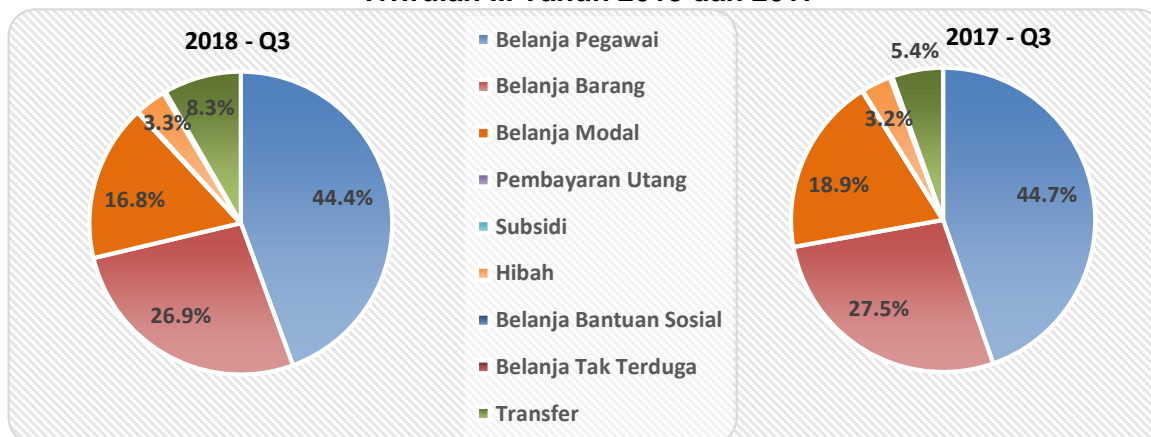
Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2018 (diolah);

Berdasarkan jenis belanja, porsi belanja operasi masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang masing-masing 44,4% dan 26,9% dari total belanja dan transfer konsolidasian. Sedangkan porsi belanja modal hanya sebesar 16,8% dari total belanja dan transfer konsolidasian. Masih kecilnya porsi belanja modal dibanding belanja barang, maka belanja/pengeluaran yang lain harus difokuskan pada jenis program atau kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung (efek multiplier) terhadap perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi lebih berkualitas.



## 2. Analisis Perubahan

**Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasi Provinsi Jambi  
Triwulan III Tahun 2018 dan 2017**

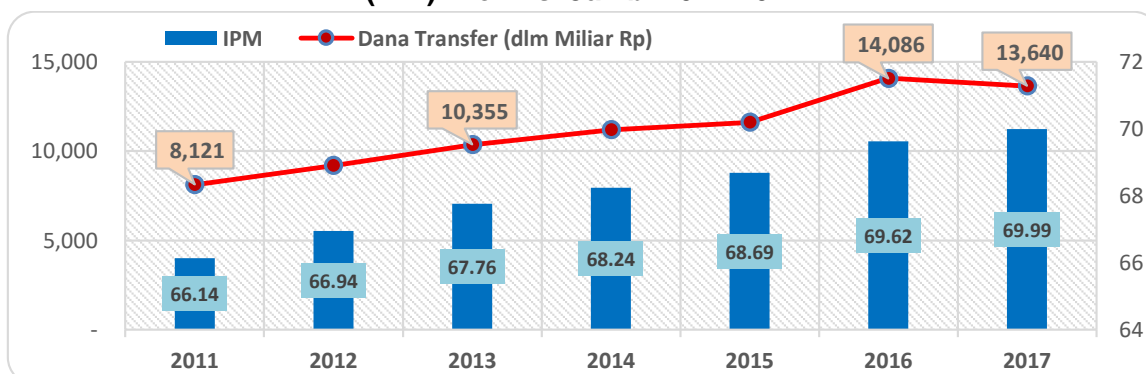


Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2018 (diolah)

Secara umum, komposisi belanja konsolidasi s.d. triwulan III 2018 tidak terlalu berbeda jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain belanja Transfer, terbesar masih belanja pegawai 44,4% dari total belanja konsolidasi. Diikuti belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 26,9% dan 16,8%. Dibandingkan tahun sebelumnya, perbedaan cukup signifikan terdapat pada belanja transfer yang mengalami kenaikan (pada tahun 2017 komposisinya mencapai 5,4%) dan meningkatnya transfer konsolidasi sebagai dampak langsung dari perubahan kebijakan penyaluran DAK Fisik (Reguler, Penugasan, dan Afirmasi) dan Dana Desa sesuai amanat PMK 112/PMK.5/2017 tentang Perubahan PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

## 3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

**Grafik 4.6 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi 2011-2017**



Sumber : BPS, Simtrada 2018 (data diolah)

Kebijakan fiskal (dana transfer) pemerintah pusat lingkup Provinsi Jambi sejalan dengan kebijakan *money follow program* untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dalam IPM. Hal ini ditandai juga dengan besaran pagu DAK Fisik dan Dana Desa yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Selanjutnya, perbaikan kualitas SDM tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja perekonomian sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi regional yang telah direncanakan.

#### D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu:

$$E. Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

**Y** = Pendapatan Nasional, **C** = Konsumsi Rumah Tangga, **I** = Investasi,

**G** = Belanja Pemerintah, **X** = Ekspor, dan **M** = Impor

Analisis kontribusi pemerintah pada PDRB menggunakan data yang diambil dari Laporan Operasional (*Statement of Government Operations*). Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jambi triwulan III Tahun Pelaporan:

TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :		
<b>A1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>20,355,497,963,935</b>
a	Pajak	4,182,361,134,953
b	Kontribusi Sosial	-
c	Hibah	969,160,971,526
d	Pendapatan Lainnya	15,203,975,857,455
<b>A2</b>	<b>Beban</b>	<b>13,225,553,856,779</b>
a	Kompensasi Pegawai	6,216,084,301,085
b	Penggunaan Barang dan Jasa	3,420,291,002,383
c	Konsumsi Aset Tetap	-
d	Bunga	-
e	Subsidi	14,616,554,000
f	Hibah	2,087,295,489,247
g	Manfaat Sosial	33,606,105,782
h	Beban Lainnya	1,453,660,404,282
<b>GOB</b>	<b>Keseimbangan Operasi Bruto/Neto (1-2+23+NOBz)</b>	<b>7,129,944,107,156</b>
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :		
<b>A31</b>	<b>Akuisisi Aset Non Keuangan Neto</b>	<b>1,660,329,111,742</b>
a	Aset Tetap	1,655,564,809,599
b	Perubahan Persediaan	-
c	Barang Berharga	-
d	Aset Non Produksi	4,764,302,143
<b>NLB</b>	<b>Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)</b>	<b>5,469,614,995,414</b>
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :		
		<b>(5,469,614,995,414)</b>
<b>A32</b>	<b>Akuisisi Neto Aset Keuangan</b>	<b>5,446,853,035,469</b>
a	Dalam Negeri	5,446,853,035,469
b	Luar Negeri	-
<b>A33</b>	<b>Keterjadian Kewajiban Neto</b>	<b>(22,761,959,945)</b>
a	Dalam Negeri	(22,761,959,945)
b	Luar Negeri	-

Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2018 (diolah)

Dalam Laporan Operasional, kita dapat menghitung kontribusi pemerintah terhadap PDRB, terutama dari belanja pemerintah (G) dan investasi (I). Nilai belanja pemerintah (G) dicerminkan/diproxikan dari nilai pengeluaran konsumsi pemerintah yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai investasi pemerintah dicerminkan/diproxikan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap, dalam Laporan Operasional sama dengan nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto.

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.

Perhitungan:

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Rp13,23 triliun, PMTB Rp1,66 triliun dan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi Rp53,03 triliun, maka didapatkan;

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah  $13,23/53,03 = 24,94\%$
2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah  $1,66/53,03 = 3,13\%$

Berdasarkan data diatas, kontribusi belanja pemerintah terhadap output ekonomi Jambi mencapai 24,94%. Namun dari jumlah tersebut, sebagian akan terdistribusi ke dalam konsumsi rumah tangga jika dilihat dari struktur PDRB yang dirilis BPS. Meskipun relatif kecil namun kontribusi belanja pemerintah memiliki peran cukup signifikan terhadap perekonomian Jambi. Belanja pemerintah (belanja pegawai dan belanja barang) cenderung bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi perekonomian, sehingga peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi akan kurang optimal ketika realisasi belanja tidak terserap secara teratur dan hanya menumpuk di akhir tahun. Sama halnya dengan investasi pemerintah yang memiliki kontribusi 3,13% terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Meskipun nilainya tidak terlalu signifikan namun efeknya akan dirasakan dan mempengaruhi perekonomian pada masa yang akan datang.

Untuk saat ini, realisasi belanja pemerintah (baik pusat dan daerah) perlu disegerakan untuk diakselerasi penyerapannya (khususnya belanja daerah) agar tidak terjadi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran. Realisasi belanja yang terkonsentrasi hanya pada triwulan III dan IV akan berakibat pada minimnya kontribusi belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Ekonomi Jambi sangat bergantung terhadap sektor primer sehingga ketika terjadi *shock* pada harga dan permintaan komoditas unggulan (minyak bumi dan gas, batubara, karet, dan CPO) akan langsung berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jambi. Mempertimbangkan harga komoditas (sawit dan karet) yang masih fluktuatif (trennya menurun) hingga akhir tahun 2018, peran *government spending* sangat dibutuhkan sebagai stimulus perekonomian sehingga laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih mampu tumbuh meskipun ada resiko eksternal.

## V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

### A. Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi Tahun 2018

#### DAK Fisik

Total alokasi DAK Fisik Provinsi Jambi tahap II telah mencapai Rp 1,06 triliun dengan total realisasi penyaluran sebesar Rp 649,89 miliar. Realisasi penyaluran tersebut terdiri dari: DAK Fisik s.d Tahap II (Rp634,03 miliar) dan DAK Fisik Sekaligus (Rp 15,86 miliar).

#### Realisasi DAK Fisik (Bertahap & Sekaligus) berdasarkan Jenis Dana TA 2018 (dalam jutaan Rp)

No	Pemda	DAK Reguler			DAK Penugasan			DAK Afirmasi		
		APBN	Realisasi	Sisa Dana	APBN	Realisasi	Sisa Dana	APBN	Realisasi	Sisa Dana
1	Prov. Jambi	48.591	31.727	16.864	145.043	81.744	63.300	779	740	39
2	Batanghari	48.394	28.645	19.749	10.120	4.484	5.636	-	-	-
3	Tanjab Barat	24.204	17.089	7.116	32.571	22.800	9.771	-	-	-
4	Bungo	38.167	25.422	12.745	38.500	27.094	11.406	23.576	16.952	6.623
5	Sarolangun	53.706	35.396	18.310	17.248	9.371	7.877	-	-	-
6	Kerinci	50.616	35.431	15.185	4.312	3.200	1.111	-	-	-
7	Merangin	79.417	55.592	23.825	5.990	3.131	2.859	-	-	-
8	Tanjab Timur	38.584	20.051	18.533	61.216	41.432	19.784	21.388	14.971	6.416
9	Tebo	41.671	21.750	19.921	3.754	2.793	961	-	-	-
10	Muaro Jambi	59.177	15.418	43.759	14.874	3.143	11.731	-	-	-
11	Kota Jambi	102.064	66.924	35.141	52.359	33.632	18.728	-	-	-
12	Kota S. Penuh	36.146	25.495	10.650	12.143	5.466	6.677	-	-	-
<b>Total</b>		<b>620.738</b>	<b>378.940</b>	<b>241.797</b>	<b>398.131</b>	<b>238.291</b>	<b>159.840</b>	<b>45.743</b>	<b>32.664</b>	<b>13.079</b>

Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/> (data diolah)

Dari total alokasi tersebut, Provinsi Jambi menjadi daerah dengan realisasi DAK Fisik tertinggi dengan total realisasi sebesar Rp114,21 miliar. Sebaliknya, kabupaten Muaro Jambi menjadi daerah dengan realisasi DAK Fisik terendah dengan total realisasi Rp18,56 miliar atau 25,07% dari alokasinya.

#### Total Realisasi DAK Fisik per Bidang TA 2018

No	DAK Fisik per Bidang	APBN	Realisasi Penyaluran	%	Sisa Dana
1	Reguler - Pendidikan	124.986.208.000	76.124.595.700	60,91	48.861.612.300
2	Reguler - Kesehatan & KB	170.705.127.000	94.883.350.800	55,58	75.821.776.200
3	Reguler - Air Minum	8.846.265.000	7.363.614.600	83,24	1.482.650.400
4	Reguler - Perumahan & Pemukiman	2.394.705.000	1.676.293.500	70,00	718.411.500
5	Reguler - Pertanian	42.099.854.000	22.378.427.150	53,16	19.721.426.850
6	Reguler - Pariwisata	11.541.834.000	4.754.943.050	41,20	6.786.890.950
7	Reguler - Industri Kecil & Menengah	2.000.000.000	1.400.000.000	70,00	600.000.000
8	Reguler - Pasar	5.820.936.000	3.163.454.700	54,35	2.657.481.300
9	Reguler - Kelautan & Perikanan	15.732.842.000	10.598.050.690	67,36	5.134.791.310
10	Reguler - Sanitasi	8.457.351.000	5.060.513.850	59,84	3.396.837.150
11	Reguler - Jalan	228.152.688.000	151.537.103.250	66,42	76.615.584.750
12	Penugasan - Pendidikan SMK	31.578.938.000	7.894.734.500	25,00	23.684.203.500
13	Penugasan - Kesehatan	142.632.809.000	95.613.698.700	67,03	47.019.110.300
14	Penugasan - Sanitasi	31.656.680.000	15.384.730.250	48,60	16.271.949.750
15	Penugasan - Air Minum	11.757.827.000	8.230.478.900	70,00	3.527.348.100
16	Penugasan - Jalan	90.934.787.000	63.654.350.900	70,00	27.280.436.100
17	Penugasan - Pasar	25.307.388.000	13.338.792.500	52,71	11.968.595.500
18	Penugasan - Irigasi	45.492.705.000	25.089.448.050	55,15	20.403.256.950
19	Penugasan - Energi Skala Kecil	789.467.000	708.384.988	89,73	81.082.012
20	Penugasan - LH & Kehutanan	17.980.123.000	8.375.919.050	46,58	9.604.203.950
21	Afirmasi - Kesehatan	588.800.000	580.697.775	98,62	8.102.225
22	Afirmasi - Perumahan & Pemukiman	1.031.683.000	722.178.100	70,00	309.504.900
23	Afirmasi - Transportasi	14.729.529.000	10.591.470.300	71,91	4.138.058.700
24	Afirmasi - Pendidikan	4.360.421.000	3.247.081.100	74,47	1.113.339.900
25	Afirmasi - Air Minum	4.904.762.000	3.433.333.400	70,00	1.471.428.600
26	Afirmasi - Sanitasi	20.127.695.000	14.089.386.500	70,00	6.038.308.500
<b>Total</b>		<b>1.064.611.424.000</b>	<b>649.895.032.303</b>	<b>61,05</b>	<b>414.716.391.697</b>

Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/> (data diolah)

Dengan semakin membaiknya kinerja penyaluran DAK Fisik di daerah telah memberikan kontribusi positif dalam peningkatan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ke tahun (IPM 2014, 2015, 2016 dan 2017 dengan besaran indeks berturut-turut 68,24; 68,69; 69,62; dan 69,99) dapat terlihat dengan besarnya porsi DAK Fisik bidang jalan, pendidikan dan kesehatan khususnya di wilayah Provinsi Jambi

Namun demikian, dalam penyaluran DAK Fisik tahap II masih ditemukan beberapa permasalahan yang harus mendapatkan perhatian. **Identifikasi permasalahan penyaluran DAK Fisik tingkat Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :**

1. Kurangnya koordinasi antar SKPD-BPKAD terkait pemenuhan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyaluran tahap II (khususnya dokumen yang akan direkam dalam OMSPAN);
2. Lambatnya penyampaian penyelesaian pekerjaan dan pelaporan capaian output di pemda yang berdampak terhadap terlambatnya proses perekaman dan upload data kontrak pada aplikasi OMSPAN sehingga DAK Fisik belum dapat disalurkan;
3. Gagalnya 5 bidang DAK Fisik di 3 Kabupaten dan 1 Kota pada penyaluran tahap I menyebabkan penyaluran tahap II tidak dapat disalurkan.

#### **Rekomendasi**

1. Dalam rangka meminimalkan resiko gagal salur untuk tahap III, Kanwil DJPB Provinsi Jambi meminta KPPN untuk berperan aktif dengan meningkatkan koordinasi intensif dan sinergi antara KPPN-Pemda (BPKAD dan SKPD) secara berkelanjutan dalam penyaluran DAK Fisik TA 2018, antara lain (1) KPPN membuat surat penegasan penyaluran DAK Fisik tahap III dan (2) membuat media komunikasi via WA group yang beranggotakan Kanwil DJPB, KPPN dan Pemda;
2. Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik TA 2018 tahap III *on site* bersama KPPN dan berkoordinasi dengan Pemda lingkup Provinsi Jambi dalam mengurangi resiko gagal salur dan/atau lebih/kurang salur (penyaluran tahap selanjutnya).
3. Meminta KPPN untuk lebih teliti dalam memvalidasi keakuratan jumlah dan kebenaran dokumen sumber penyaluran DAK Fisik, salah satunya dengan membuat kartu pengawasan manual DAK Fisik.